

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099376/2017**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (18) | SULAWESI TENGAH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (099376) | PENGADILAN NEGERI PALU |
| Sebesar | : Rp. | 260.287.000 (DUA RATUS ENAM PULUH JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Jumlah Uang
	Rp. 260.287.000
	Rp. 260.287.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	260.287.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U (051) Rp. 260.287.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099376/2017
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4006-7490-5870-1440

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (099376) PENGADILAN NEGERI PALU

Kuasa Pengguna Anggaran : ADISON SIREGAR, SH
Bendahara Pengeluaran : NI LUH HERLINA MAYDI ASRI SUANDA, SE
Pejabat Penanda Tangan SPM : LISDIRI

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		260.287.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		260.287.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		260.287.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		260.287.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
Keluaran (Output)	1049.003	Pos Bantuan Hukum	480,00 Jam Layanan	48.000.000
	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	750,00 Perkara	210.787.000
	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	2,00 Perkara	1.500.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

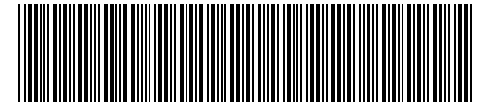
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099376/2017

I B. SUMBER DANA



DS:4006-7490-5870-1440

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (099376) PENGADILAN NEGERI PALU

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2017	Rp.	260.287.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	260.287.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099376/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4006-7490-5870-1440

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (099376) PENGADILAN NEGERI PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099376	PENGADILAN NEGERI PALU	-	260.287	-	-	-	260.287		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	260.287	-	-	-	260.287		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	260.287	-	-	-	260.287		
1049.003	Pos Bantuan Hukum	-	48.000	-	-	-	48.000	18.51	
01	RM	-	48.000	-	-	-	48.000	051	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	210.787	-	-	-	210.787	18.00	
01	RM	-	210.787	-	-	-	210.787	051	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	1.500	-	-	-	1.500	18.00	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	051	
JUMLAH		-	260.287	-	-	-	260.287		

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099376/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4006-7490-5870-1440

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (099376) PENGADILAN NEGERI PALU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099376	PENGADILAN NEGERI PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.395	5.310	9.318	14.264	14.993	16.658	28.918	28.137	30.506	31.130	34.852	43.806	260.287
		52 BELANJA BARANG	2.395	5.310	9.318	14.264	14.993	16.658	28.918	28.137	30.506	31.130	34.852	43.806	260.287
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	2.395	5.310	9.318	14.264	14.993	16.658	28.918	28.137	30.506	31.130	34.852	43.806	260.287
		52 BELANJA BARANG	2.395	5.310	9.318	14.264	14.993	16.658	28.918	28.137	30.506	31.130	34.852	43.806	260.287
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	22.000
		- PNB (423411)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
		- PNB (423413)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
		- PNB (423415)	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	917	11.000
		- PNB (423419)	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099376/2017
IV. C A T A T A N**



DS:4006-7490-5870-1440

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099376] PENGADILAN NEGERI PALU

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004